

**KRIMINALITAS DI KOTA MAKASSAR TAHUN 1945 HINGGA 1959**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Hasanuddin

**Disusun Oleh:**

**ARISAL**

**F81116304**

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022



**HALAMAN PENERIMAAN  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Pada hari Kamis, 3 November 2022, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**KRIMINALITAS DI KOTA MAKASSAR TAHUN 1945-1959**

Yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 3 November 2022



- |  |              |   |   |
|--|--------------|---|---|
| 1. Dr. Iham, S.S., M.Hum               | Ketua        | : |  |
| 2. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.   | Sekretaris   | : |  |
| 3. Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A        | Penguji I    | : |  |
| 4. Dr. Ida Liana Tanjung, S.Pd., M.Hum | Penguji II   | : |  |
| 5. Dr. Iham, S.S., M.Hum.              | Konsultan I  | : |  |
| 6. Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.   | Konsultan II | : |  |

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

**Nama** : Arisal

**NIM** : F81116304

**Program Studi** : Ilmu Sejarah

**Fakultas** : Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

**Judul Skripsi** : Kriminalitas di Kota Makassar tahun 1945-1959

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Hasanuddin Makassar
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Hasanuddin Makassar
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, 30 November 2022

  
Arisal

## KATA PENGANTAR

Seolah-olah tanpa penindasan, sejarah tidak ada. Kemiskinan dan ketidakadilan sudah dianggap hal yang normal. Keinsafan bagiku dan kamu, bahwa perjuangan harus selalu tetap hidup. Maka teruntuk Karl Marx penghargaan kepada umat manusia kepada dirinya yang mencoba mengakhiri penindasan itu, atau “*explotation der l’homme par l’homme*,” kata Soekarno.

Jangan berharap menemukan apa yang Anda cari. Suatu ide yang belum selesai, tetapi patut bersyukur. Saya menerima kebaikan dari sejumlah orang. Ucapan Terima Kasih kepada orang tua saya, Masmuria dan Aras yang telah menumbuhkan, mengingatkan, memberikan kebebasan, dan inspirasi dalam memperjuangkan kehidupan ini. Begitupun ucapan terima kasih kepada kedua saudara saya, Arwan dan Amin Syah terus melangkah temukan hidupmu.

Sebagai penanggung jawab penulisan skripsi ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Skripsi, Dr. Ilham M.Hum dan Drs. Dias Pradadimara M.A. Begitu pula atas kebaikan dan saran dari Dosen Penguji, Amrullah Amir S.S., M.A., Ph.D, dan Dr Ida Liana Tanjung, S.Pd., M.Hum, untuk tulisan ini ke depannya. Serta dosen-dosen di Departemen Ilmu Sejarah Unhas. Guru yang terbaik dalam sanubari setiap muridnya.

Setiap langkah yang membentuk seseorang dipertemukan manusia-manusia baik. Syukurnya dapat dipertemukan dengan Bung Anto, Kahfi, dan Ma'ruf. Serta kawan-kawan yang sering berinteraksi di Departemen Ilmu Sejarah Unhas

Kepada Penerbitan Kampus (PK) *identitas* Unhas dan para alumninya terima kasih telah menumbuhkan 'padi-padi' seperti saya. Semoga tetap menjadi wadah untuk terus tumbuh. Hal yang sama juga kepada Magang 46, Magang 47, Magang 48, Magang 49, dan Magang 50, serta kawan-kawan yang sering berinteraksi di rumah kecil *identitas*.

Makassar, 29 September 2022

Penulis

Arisal

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR SINGKATAN .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan Masalah dan Rumusan Masalah.....	5
1.2.1 Batasan Masalah .....	5
1.2.2 Batasan Temporal.....	6
1.2.3 Batasan Spasial .....	6
1.3 Rumusan Masalah.....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	12

1.7	Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II Kondisi Kota Makassar 1945-1966.....</b>		<b>15</b>
2.1	Kota Kosmopolitan.....	15
2.2	Gejolak Politik Kota Makassar.....	17
2.3	Gelombang Migrasi.....	23
2.4	Kemajuan dan Permasalahan Sosial.....	28
<b>BAB III Kota Makassar dan Ragam Kriminalitas.....</b>		<b>33</b>
3.1	Transisi dan Kriminalitas.....	33
3.2	Pencurian dan Perampokkan.....	36
3.3	Prostitusi dan Kriminalitas.....	47
<b>BAB IV Mengatasi Kriminalitas di Kota Makassar.....</b>		<b>53</b>
4.1	Upaya ketertiban di Kota Makassar.....	53
4.2	Penjara.....	63
<b>BAB V Kesimpulan.....</b>		<b>70</b>
Daftar Pustaka.....		73
Lampiran.....		79



## DAFTAR SINGKATAN

<b>APRIS</b>	Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
<b>NIT</b>	Negara Indonesia Timur
<b>NKRI</b>	Negara Kesatuan Republik Indonesia
<b>RIS</b>	Republik Indonesia Serikat
<b>TRI</b>	Tentara Republik Indonesia
<b>TKR</b>	Tentara Keselamatan Rakyat
<b>SPK</b>	Serikat Pembasmi Kemaksiatan
<b>TII</b>	Tentara Islam Indonesia
<b>KMK</b>	Komando Militer Kota
<b>KMKB</b>	Komando Militer Kota Besar
<b>KMB</b>	Konferensi Meja Bundar
<b>KL (KNIL)</b>	<i>Koninklijk Leger atau Tentara Kerajaan</i>
<b>KUHP</b>	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
<b>KNIL</b>	<i>Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger</i>

## ABSTRAK

**Arisal, dengan judul "Kriminalitas di Kota Makassar tahun 1945-1959",  
dibimbing oleh Dr. Ilham, S.S., M.Hum., dan Drs. Dias Pradadimara, M.A.,  
M.S.**

Karya ini disusun menggunakan sumber Arsip Hindia Belanda dan Koran Terbitan Belanda yang memberikan gambaran tentang Kota Makassar pada tahun 1945 hingga 1959. Penjelasan tersebut dibagi atas dua periode yang khas, pertama 1945 hingga 1949 (biasanya disebut periode Perang Kemerdekaan), yang hingga saat masih sedikit sekali sumber yang bercerita tentang periode tersebut di Kota Makassar, bahkan mitos seringkali menjadi pegangan masa tersebut.

Periode kedua setelah Konferensi Meja Bundar 1949 hingga 1959, menjadi penting lantaran melihat genealogi kekerasan atau kriminalitas sebelum dan setelah 1949. Pada periode 1945 hingga 1959 telah terjadi secara umum empat kali pergantian kekuasaan, dalam masa transisi tersebut, muncul berbagai bentuk tindakan kekerasan. Tematis kriminalitas menjadi pendukungnya dalam melihat gejala-gejala tersebut di Kota Makassar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk kriminalitas dan bagaimana mengatasi kekerasan di Kota Makassar.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta 1945, kondisi ini jauh berbeda yang dialami di Kota Makassar, terbentuk laskar-laskar dengan tipikal aksi pembunuhan, pencurian dan perampokan yang melakukan aksi sampai tahun 1947. Setelah itu, tetap terjadi kekerasan yang dilakukan oleh sisa dari penangkapan para laskar-laskar dan yang pergi ke Jawa melanjutkan perjuangan. Sedangkan, tipikal kekerasan tahun 1949 hingga 1959 lebih beragam lagi, selain dari gerombolan juga disebabkan oleh orang-orang yang memanfaatkan kesempatan dalam masa kekacauan, terlebih permasalahan ekonomi.

**Kata Kunci : Kriminalitas, Kekerasan, Kota Makassar**

## ABSTRACT

**Arisal, with the title "Criminality in Makassar City in 1945-1959", was supervised by Dr. Ilham, S.S., M. Hum., and Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.**

This work was compiled using the sources of the Dutch East Indies Archives and the Dutch Published Newspapers which provide an overview of Makassar City from 1945 to 1959. The explanation is divided into two distinct periods, the first is 1945 to 1949 (usually called the period of the War of Independence), which until now is still little. There are many sources that tell stories about that period in Makassar City, even myths are often the basis of that period.

The second period after the 1949 to 1959 Round Table Conference is important because it looks at the genealogy of violence or crime before and after 1949. In the period 1945 to 1959 there were generally four changes of power, during this transition period, various forms of violence emerged. The thematic of crime is his supporter in seeing these symptoms in Makassar City. Therefore, this study aims to explain the forms of crime and how to overcome violence in Makassar City.

After the Proclamation of Independence of the Republic of Indonesia in Jakarta 1945, this condition was much different from what was experienced in Makassar City, formed laskars with typical acts of murder, theft and robbery that carried out actions until 1947. After that, violence continued to be carried out by the rest of the arrests. the laskars and those who went to Java continued the struggle. Meanwhile, the typical violence from 1949 to 1959 was more diverse, apart from gangs, it was also caused by people taking advantage of opportunities in times of chaos, especially economic problems.

**Keywords: Crime, Violence, Makassar City**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, Kota Makassar menempati posisi yang sangat penting sebagai pusat pemerintahan. Kedudukan ini terus bertahan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta pada 1945. Pada masa berdirinya Negara Indonesia Timur (NIT) tahun 1945 hingga 1950, Kota Makassar menjadi pusat pemerintahan. Hal ini terjadi berkat pihak Belanda yang berhasil meyakinkan pemimpin lokal di Indonesia bagian timur untuk membentuk NIT. Berdirinya NIT dengan kekuatan elit-elit politik yang terpusat di Kota Makassar, menyebabkan terjadinya dikotomi kota dan desa. Kota sebagai simbol “boneka” atau penghianat, sedang di luar kota (pedesaan) sebagai basisnya patriot atau pejuang kemerdekaan.<sup>1</sup> Hal ini menyebabkan kota menjadi sasaran teror oleh pihak pejuang seperti laskar-laskar dan organisasi-organisasi ‘hitam’ dari luar kota atau pedalaman. Teror yang meliputi, penembakan, pembunuhan, pencurian, perampokan, dan tindakan kekerasan lainnya di kota, yang menyebabkan kota tidak aman.

Akhir Oktober 1945 diperkirakan ada 25 kelompok-kelompok pemuda di Makassar. Salah satu yang penting adalah organisasi Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI) yang merupakan gabungan dari laskar-laskar, dan kelompok-kelompok pelajar yang dipimpin Manai Sophian dibentuk sebagai respon

---

<sup>1</sup> Barbara Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi ke DI/TII*, (Jakarta : Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. 107.

kedatangan NICA. Namun, PPNI tidak bertahan lama dikarenakan serangan kedua ke Kota Makassar pada 28-29 Oktober 1945 yang awalnya berhasil merebut kantor-kantor penting seperti radio dan menurunkan bendera Belanda di kantor pemerintahan cepat ditanggapi oleh NICA. NICA yang dibantu oleh tentara Australia berhasil memukul aksi bersenjata PPNI. Setelah itu, laskar-laskar kembali mencoba membangun kekuatan dengan menggabungkan diri dalam Laskar Pemberontak Sulawesi Indonesia (Lapris) yang dipimpin oleh Ranggong Daeng Romo. Selain kedua kesatuan kelompok tersebut, organisasi ‘hitam’ seperti ‘Semut Merah’ turut aktif melakukan teror di dalam Kota Makassar tahun 1945-1947.<sup>2</sup>

Selain kelompok-kelompok pemuda yang terbentuk di Kota Makassar, terdapat juga tentara yang dikirim dari Jawa oleh Kahar Muzakkar pada bulan-bulan tahun 1946. Delapan dari dua belas gelombang ekspedisi Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRI-PS) yang dikirim mendarat selamat di Pulau Sulawesi. Di dalam TRI-PS terdapat dua kelompok yang berbeda yakni, kelompok pertama, terdiri dari pemuda atau pelajar seperti Saleh Lahade, dan Andi Mattalata yang pada umumnya berpendidikan di sekolah-sekolah Belanda. Banyak di antaranya dari kaum aristokrat atau keluarga biasa yang kaya. Kelompok kedua, tidak berpendidikan, dan beberapa lagi adalah bandit, para penjahat biasa seperti pencopet, pencuri, dan pembunuh. Mereka adalah jago

---

<sup>2</sup> Sarita Pawiloy, *Sejarah Perjuangan Angkatan 45 di Sulawesi Selatan*, (Ujung Pandang : Dewan Harian Daerah Angkatan 45 , 1987), hlm. 101

tempur yang tidak kenal takut akan tetapi sukar dikendalikan.<sup>3</sup> Kedua kelompok dalam TRI-PS sebenarnya sudah mencakup hampir semua pemuda dari Sulawesi Selatan.

Gerakan bersenjata yang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang tergabung dalam badan-badan perjuangan maupun diluar kesatuan organisasi berakhir atau tidak aktif lagi pada awal-awal Februari 1947. Hal ini ditandai dengan terbunuhnya para pimpinan laskar, salah satunya Ranggong Daeng Romo terbunuh ketika markas besar Lapris di Polombangkeng diserang pada 28 Februari 1947. Gerakan bersenjata juga dilumpuhkan dengan ditangkapnya pimpinan dan pengikut badan-badan perjuangan tersebut. Seperti Robert Wolter Monginsidi terjaring razia yang dilakukan NICA dan dipenjara tanggal 28 Februari 1947. Sebagian juga memilih untuk melanjutkan perjuangan ke Jawa, ketika perlawanan terhadap Belanda di Sulawesi Selatan tidak memungkinkan lagi. Hal ini dikarenakan adanya aksi pasifikasi yang dipimpin oleh Westerling dari bulan Desember 1946 hingga Maret 1947.

Desember 1949 menjadi bulan yang penting dalam sejarah Kota Makassar karena pemerintah Indonesia dan Belanda menyepakati mengakhiri permusuhan, kesepakatan ini berlangsung dalam perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Kemudian bersepakat bekerjasama dalam suatu bentuk negara serikat yakni Republik Indonesia Serikat. Namun, kehidupan setelah 1945 hingga 1949 yang dalam historiografi dikenal masa perang kemerdekaan atau pascarevolusi ternyata tidak berbeda dengan masa revolusi. Kehidupan

---

<sup>3</sup> *Op. Cit*, Barbara Harvey, hlm. 144.

masyarakat Kota Makassar pada 1950 hingga 1959 berlangsung dengan kondisi yang meresahkan warga melalui berbagai aksi kejahatan. Pertama persoalan datang dari para tahanan yang dipenjara sampai tahun 1949. Ketakutan ketika melepaskan para tahanan tersebut ke masyarakat akan menyebabkan aksi balas dendam atas perbuatan yang dilakukan kepada mereka pada masa gerakan Westerling, khususnya yang bekerja sama dengan NICA, Kelompok Westerling, dan mereka yang dianggap penghianat. Kedua, adanya kelompok-kelompok yang masih tetap setuju mempertahankan NIT dan tidak setuju penyatuan NIT ke dalam Republik Indonesia Serikat (RIS). Hal ini mendorong Andi Azis beserta tentara *Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger* (KNIL) melakukan gerakan bersenjata melawan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) di Kota Makassar yang berlangsung mulai 5-15 April 1950. Masalah ketiga, persoalan gerilyawan yang berlangsung cukup lama di Sulawesi Selatan. Gerilyawan yang tidak dimasukkan dalam keanggotaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat yang terkesan meminggirkan mereka.<sup>4</sup> Laskar-laskar yang pada tahun 1945 hingga 1949 telah berjuang bagi

---

<sup>4</sup> Setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, maka di mana-mana terbentuk badan-badan keamanan rakyat (BKR) di terdiri dari pemuda-pemuda yang mempunyai didikan militer (bekas Heiho, bekas Peta, bekas KNIL dan sebagainya). Di samping BKR ini timbul pula laskar-laskar, barisan-barisan, dan organisasi-organisasi rakyat. Kemudian pada tgl. 5 Mei 1947 keluarlah Penetapan Presiden yang mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan laskar-laskar bersenjata menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Karenanya tidak ada lagi laskar atau organisasi bersenjata. Semua ini nantinya akan disatukan dalam organisasi tentara. Hal ini kemudian berlanjut pada masa Kabinet Hatta dengan Program Rekonstruksi dan Rasionalisasi (Rera) yang bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, khususnya untuk menggaji tentara militer pada 1948.



kemerdekaan, bahkan merasa punya hak dibandingkan orang-orang yang dekat dengan Belanda. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan Rasionalisasi Tentara yang dilakukan Perdana Menteri Hatta. Kebijakan tersebut, betul-betul baru berlaku di Sulawesi Selatan ketika bekas KNIL dapat terima dalam APRIS pada tahun 1950.

Peristiwa-peristiwa yang marak terjadi setelah 1950 adalah masa pembunuhan, perampokan, pencurian dan penculikan orang yang terjadi di Kota Makassar dan sekitarnya. Teror ini merupakan konsekuensi dari sulitnya menyelesaikan atau menerapkan strategi dalam menangani masalah gerilyawan. Maraknya aksi kriminalitas tersebut, selain karena kekecewaan terhadap kebijakan Rasionalisasi Tentara. Hal lain yang memungkinkan terjadi kriminalitas tersebut adalah kebutuhan ekonomi. Sebagai contoh, laskar di Jakarta melakukan aktivitas ekonomi, dimana Republik tidak mampu mencegah merajalelanya praktik kriminal berupa penyelundupan, pemerasan, dan perdagangan beras. Keuntungan hasil perdagangan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari laskar.<sup>5</sup>

Melihat kekerasan yang terjadi dari masa revolusi dan pascarevolusi di Kota Makassar, tulisan ini berusaha menelusuri bentuk kriminalitas yang terjadi pada tahun-tahun tersebut. Kemudian bagaimana upaya mengatasi kriminalitas itu. Dua hal ini nantinya akan memberikan gambaran peran dan aktivitas para laskar dan organisasi pada masa-masa transisi kekuasaan tahun 1945 hingga 1959.

## **1.2 Batasan Masalah**

---

<sup>5</sup> Robert Cribb, *Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949* (Jakarta : Masup Jakarta, 2010), hlm. 130-131.

Kuntowijoyo, pada karya terakhirnya menjelaskan pandangan John Galtung dalam *theory and Method of Social Research* mengenai sejarah sebagai ilmu diakronik. Sejarah dikatakan diakronik sebab masa lalu meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu, tetapi dalam ruang yang terbatas. Olehnya, demi memenuhi kaidah keilmuan penulis mengambil jarak waktu antara tahun 1945 sebagai titik awal terjadinya perubahan kehidupan masyarakat Indonesia yakni Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Untuk batasan tahunnya penulis memilih tahun 1959-an sebagai akhir pembahasan, sebab adanya perubahan dan pergantian sistem pemerintahan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Waktu yang memanjang dari 1945 hingga 1959 menandai suatu masa transisi kekuasaan di Kota Makassar dengan berbagai respon salah satunya dengan tindak kekerasan.

Penulis mengambil batasan spasial adalah Kota Makassar. Kota Makassar dalam hal ini, pada periode awal kemerdekaan merupakan ibu kota provinsi Sulawesi. Kemudian pada periode 24 Desember 1946 hingga 17 Agustus 1950, Kota Makassar menjadi ibu kota Negara Indonesia Timur. Setelah itu, Kota Makassar menjadi ibu kota provinsi Sulawesi dalam Negara Republik Indonesia.

Pada 1960 melalui peraturan UU Nomor 47 Tahun 1960, daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara menjadi provinsi dengan ibu Kota Makassar. Selanjutnya berkembang pada 1964 melalui UU Nomor 13, terjadi pemisahan Sulawesi Selatan dari daerah Sulawesi Tenggara, hingga Sulawesi Selatan menjadi wilayah otonomi dengan ibu Kota Makassar.

Dalam batasan tematik, penulis memfokuskan penelitian ini pada kriminalitas yang akan membahas tindakan perampokan, pencurian, pembunuhan, pembegalan, pembakaran yang disengaja, tawuran antar pemuda, pemerasaan, pencopetan, pengeroyokan, tawuran. Selain itu, akan diteliti dan dibahas juga tindakan kriminalitas secara luas.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Dalam memahami persoalan kriminalitas yang terjadi di Kota Makassar pada tahun 1945 sampai 1959, maka perlu dijelaskan setidaknya-tidaknya dua pokok permasalahan dalam kajian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk kriminalitas yang terjadi di Kota Makassar pada 1945 hingga 1959?
2. Bagaimana upaya pemerintah mengatasi kriminalitas tersebut?

### **1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

- a) Menjelaskan mengenai bentuk, dan motif kriminalitas yang terjadi di Kota Makassar pada 1945 hingga 1959?
- b) Menjelaskan upaya pemerintah mengatasi kriminalitas yang terjadi di Kota Makassar pada 1945 hingga 1959?

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

- a) Memperkaya historiografi dalam penulisan sejarah Indonesia
- b) Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

- c) Dapat menjadi referensi dengan tinjauan sejarah bagi pihak keamanan dalam hal ini kepolisian dalam penanganan kriminalitas di kota.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Penelitian yang Relevan**

Dalam penelitian Kriminalitas di Kota Makassar pada 1945 hingga 1959, penulis menggunakan beberapa sumber sejarah dalam penelitian. Berupa buku dan jurnal seperti yang ditulis di bawah ini.

*Wilayah Kekerasan di Jakarta* adalah buku yang sangat penting dalam penulisan penelitian ini. Dalam buku Jerome Tadie menjelaskan berbagai simbol kerawanan, tempat kekerasan sehari-hari yang muncul di Jakarta, dan bagaimana kota dikendalikan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi serta memberikan hubungan wilayah (Jakarta) kekuasaan dan kekerasan dalam menata kota.

Buku yang terbit pertama kali pada Februari 2009 ini memberikan pemahaman mengenai penelitian kota yang telah lama mengeluarkan kekerasan dari bidang kajian perkotaan. Di mana kekerasan dianggap sebagai masalah pinggiran. Namun Jerome Tadie sebaliknya berpandangan kekerasan terdapat pada inti permasalahan kota dan perkembangannya. Kota bukan sekedar pusat yang menarik segala kekayaan dan penduduk di sekitarnya, melainkan terpusatnya segala masalah pembangunan dan jati diri kota tersebut.<sup>6</sup> Buku terbitan Masup Jakarta ini, bukan saja menampilkan kekerasan yang dilakukan negara seperti

---

<sup>6</sup> Jerome Tadie, *Wilayah Kekerasan di Jakarta*. (Jakarta : Komunitas Bambu, 2009). hlm. 301.

yang paling menonjol peristiwa 1965, dan Malari 1974 serta kerusuhan massal. Tetapi bagaimana kekerasan dengan pendekatan sosial melihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat seperti perampokan, penodongan, pemerasaan, pencopetan, pengeroyokan, tawuran. Kekerasan yang muncul tersebut, juga menyoroti berbagai kelompok yang dapat disebut sebagai mafia yang menata atau mengendalikan ruang-ruang kota.

Contoh yang ditampilkan adalah peran preman sebagai tokoh yang dihormati, ditakuti yang mempunyai pengaruh pada orang yang berada di wilayah itu. Preman menjadi bagian dari kekuatan pengendalian kota, juga dalam kehidupan sehari-hari setiap penduduk. Bahkan preman bertindak layaknya polisi, di mana dia menempatkan dirinya di tengah penyelesaian perkara dalam dunia kriminalitas.

*Kriminalitas, Modernitas dan Identitas dalam Sejarah Indonesia*, merupakan buku yang menjelaskan aksi-aksi kekerasan fisik dari masa kerajaan dan kolonial Hindia Belanda, yang diwariskan pada generasi Indonesia berikutnya. Dalam artian berbagai bentuk aksi kekerasan seperti peperangan, perkelahian dan aksi perampokan antar desa atau kampung masih dapat ditemukan hingga hari ini. Kontinuitas kekerasan yang dibahas Henk Schulte Nordholt akan memperlihatkan tingkat kekerasan yang tinggi pada masa peralihan kekuasaan atau pun pada masa memperkuat kekuasaan dari ancaman dan juga masa ekonomi yang sulit.

Penulis juga menggunakan buku *Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi ke DI/TII* yang ditulis oleh Barbara Sillars Harvey, untuk melihat kondisi Sulawesi Bagian Selatan, khususnya kota Makassar pada abad 20-an. Ada juga makalah yang berjudul *Merayakan Teknologi : Infrastruktur dan Tata Kota Makassar 1900-1942* yang ditulis oleh Ilham Daeng Makkelo yang menjelaskan tentang sarana dan infrastruktur di Kota Makassar. Memberikan gambaran mengenai penataan fasilitas dari jalanan hingga ke bangunannya sehingga dapat membantu penulis untuk memberikan pemahaman mengenai pembangunan, penataan ruang kota dan suasana di Kota Makassar.

Kemudian buku *Kota Lama Kota Baru : Sejarah Kota-Kota di Indonesia* yang disusun oleh Freek Colombijn dkk yang merupakan kumpulan tulisan mengenai sejarah kota-kota besar di Indonesia. Di dalamnya termuat tulisan, *Penduduk Kota, Warga Kota dan Sejarah Kota : Kisah Makassar* yang ditulis oleh Dias Pradadimara. Tulisan yang akan membantu memberikan gambaran keadaan Kota Makassar pada masa kolonial hingga kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, untuk metode penulisan skripsi sejarah, penulis memanfaatkan buku *Penjelasan Sejarah* dari Kuntowijoyo dan buku *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* oleh Sartono Kartodirdjo yang membantu dalam memberikan pendekatan atau ilmu bantu penulisan sejarah.

Tinjauan pustaka di atas banyak memiliki kesamaan dengan penulis lain yang menulis mengenai penulisan sejarah dan kriminalitas Indonesia khususnya juga Kota Makassar, namun belum ada yang berfokus dan memberikan detail

mengenai kriminalitas yang terjadi di Kota Makassar. Kajian kriminalitas di kota, lebih banyak yang menuliskan di pinggiran kota yang memunculkan kekerasan. Padahal di inti atau pusat kota sendiri masih terjadi tindak kriminalitas. Apalagi Kota Makassar dalam rentang waktu 1945 hingga 1959 mengalami kondisi perebutan dan pergantian kekuasaan, yang memunculkan tingkat kekerasan meningkat. Atas hal itu, yang mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai Kriminalitas di Kota Makassar 1945 hingga 1959.

### **1.5.2 Landasan Konseptual**

Menurut W.A. Bonger, kriminalitas merupakan perbuatan yang cenderung mengganggu ketentraman umum yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu didorong oleh paksaan yang sangat kuat. Kriminalitas juga dapat dilakukan karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, yang mengharuskannya untuk melawan dan terpaksa membalas menyerang. Menurut Kartini Kartono dan Edwin H. Sutherland, kriminalitas bukanlah warisan atau bawaan sejak lahir. Pola perilaku kriminal tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku tersebut dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan dipelajari di dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan tindak kriminal dan alasan mendukung perbuatan tersebut. Teori lain yang disampaikan Robert K. Merton mendefinisikan kriminalitas terjadi akibat dari keadaan tanpa norma

(deregulasi) di dalam masyarakat. Situasi ini menimbulkan perilaku deviasi atau penyimpangan dari peraturan.<sup>7</sup>

Kriminalitas adalah hal-hal yang bersifat kriminal; perbuatan yang melanggar hukum pidana; kejahatan.<sup>8</sup> Kriminalitas merupakan suatu dunia yang tertutup dan mempunyai organisasi dengan perangkat aturan yang berlaku di kalangan mereka. Organisasi ini berpotensi menimbulkan bentuk perampokan, pencurian, perampasan, dan penyerangan atau kekerasan terhadap kepemilikan seseorang.<sup>9</sup>

Dalam studi kriminalitas di Kota Makassar 1945 hingga 1959, laskar dan organisasi ‘hitam’ memainkan peran dalam dunia kriminal. Apalagi di masa transisi kekuasaan, penegakkan hukum lemah hingga ketidakmampuan mencegah merajalelanya praktik kriminal berupa penyelundupan, pemerasan, dan lain sebagainya. Tanpa adanya otoritas kuat untuk mencegah munculnya praktik-praktik kriminal amatir, kesempatan untuk melangsungkan operasi terhadap kriminal menjadi terbatas.<sup>10</sup>

## **1. 6 Metode Penelitian**

Penelitian Ilmu Sejarah begitupun dengan Ilmu Humaniora lainnya menggunakan metode yang disampaikan Kuntowijoyo. Dengan memaparkan

---

<sup>7</sup> Anang Priyanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 20-22.

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia V

<sup>9</sup> Muhammad Fauzi, “Jagoan Jakarta dan Penguasaan di Perkotaan 1950-1966”, (Depok : Tesis Universitas Indonesia, 2010), hlm. 22.

<sup>10</sup> *Op. Cit*, Robert Cribb, hlm. 131.



beberapa tahapan dalam penelitian, dari pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, analisis hingga penulisan. Penulis memutuskan memilih topik Kriminalitas di Kota Makassar 1945 hingga 1959 berdasarkan ketertarikan penulis pada sejarah sosial dalam hal ini kriminalitas, begitu pun aktivitas kriminalitas di dalam kota. Dalam merekonstruksi penulisan sejarah kriminalitas ini, penulis akan menelusuri sumber-sumber primer seperti laporan, koran yang diterbitkan pada masa tersebut.

Pada tahap pengumpulan sumber, penulis juga mendatangi Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Arsip Kota Makassar, dan Arsip Jarak Dam Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin Makassar. Serta mengumpulkan informasi dari surat kabar yang terbit periode 1945 hingga 1959 di situs-situs penyedia arsip seperti Delpher. Sedangkan untuk sumber sekunder akan menggunakan referensi buku terkait kriminalitas, kekerasan di wilayah kota, dan buku sejarah Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, penulis akan melakukan kritik sumber, dengan tujuan untuk menentukan apakah data penelitian valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kritik sumber terdiri dari dua yakni menguji otentisitas dan kredibilitas sumber. Bila tahap ini telah selesai, penulis akan melanjutkan dengan langkah menghubungkan data-data sejarah, sehingga fakta atau data tersebut menghasilkan rangkaian narasi sejarah. Selanjutnya, penulis akan menuliskan data-data tersebut secara kronologi dan sistematis.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan hasil penelitian skripsi berjudul “Kriminalitas di Kota Makassar 1945-1959, akan dibagi dalam lima bab pembahasan.

Bab I pendahuluan menjelaskan hal-hal mendasar dari penelitian ini. Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II penulis akan menjelaskan gambaran umum Kota Makassar pada 1945 hingga 1959, begitu pun dengan peralihan kekuasaan yang berlangsung di dalamnya. Perkembangan Kota Makassar dari fasilitas yang terbangun, ruang publik yang digunakan masyarakat, jumlah penduduk yang masuk ke Kota Makassar.

Bab III penulis akan menjelaskan bentuk-bentuk kriminalitas yang terjadi di Kota Makassar pada 1945 hingga 1959. Beserta penjelasan mengapa bentuk-bentuk kriminalitas tersebut muncul di wilayah tersebut.

Bab IV penulis akan membahas bagaimana upaya pemerintah mengatasi kriminalitas yang terjadi di Kota Makassar pada 1945 hingga 1959.

Bab V penulis akan menyimpulkan tulisan dari bab-bab sebelumnya. Tentunya kesimpulan ini merupakan jawaban dan pertanyaan di rumusan masalah yang penulis ajukan, sekaligus sebagai penutup dari penelitian ini.

## BAB II

### KOTA MAKASSAR AKHIR KOLONIAL HINGGA TAHUN 1950-AN

#### 2.1 Kota Kosmopolitan

Beragamnya etnis yang mendiami Kota Makassar menjadikan wilayah ini pernah dijuluki kota kosmopolitan<sup>11</sup>. Hal ini bisa dilihat dengan adanya orang-orang yang datang, menetap, pergi, dan berkeluarga dengan penduduk sekitar, serta berbagai alasan atau tujuan lainnya. Misalnya hadirnya 9 konsulat yang mewakili negara Denmark, Swedia, Norwegia, Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, Portugal dan Cina pada 1930-an memperkuat dan memberikan kesan bahwa Kota Makassar, adalah kota kosmopolitan.<sup>12</sup>

Bukan hanya mendiami kota Makassar, bangsa-bangsa tersebut juga turut dalam membangun kota ini. Ketika wilayah Makassar ditetapkan sebagai kota *Gemeente* pada 1906, pemerintah Makassar berhak mengatur dan memerintah dirinya sendiri. Dewan Kota (*Gemeenteraad*) yang dibentuk mencirikan kekosmopolitan dengan 13 anggota yang terdiri atas, 8 orang Belanda, 3 pribumi, 2 orang timur asing. Penetapan ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan

---

<sup>11</sup> Faktor kota dikatakan kosmopolitan dapat dilihat dari perkembangan globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Berlangsungnya konektivitas yang semakin mudah berkat kemajuan dan perkembangan komunikasi, media, dan transportasi. Kota kosmopolitan ditandai dengan hadirnya masyarakat global yang berasal dari berbagai latar budaya dan bangsa yang berbeda. Lihat di, G. Andika Ariwibowo, “Perkembangan Budaya Kosmopolitan di Batavia 1905-1942”, *Handep Jurnal Sejarah dan Budaya* Vol. 3, No. 1, Desember 2019, hlm 56.

<sup>12</sup> Dias Pradadimara, “Dari Makassar ke Makassar: Aspek Demografi dan Politik proses”Etnisasi” Sebuah Kota”, *Jurnal Populasi*, 14 (1), 2003, hlm. 80.

pembangunan kota dengan kepadatan dan bertumbuhnya masyarakat perkotaan. Keterlibatan etnis lain ini berlanjut di masa Negara Indonesia Timur (NIT). Dewan kota beranggotakan 21 pejabat, yakni 4 orang Belanda, 4 orang Cina, sisanya dari kelompok orang Indonesia pada 1947.

Dibentuknya NIT mendorong para politisi dari wilayah Indonesia Timur, baik dari Manado, Maluku, dan Bali, maupun politisi dan wartawan dari Negeri Belanda, serta negara-negara lain untuk datang ke Kota Makassar pada 1946. Sifat kosmopolitan ini mempertegas perbedaan antara Kota Makassar dengan daerah di luar kota di Sulawesi Selatan.<sup>13</sup> Hal ini pun didukung oleh penjelasan Barbara Harvey bahwa sampai dibubarkannya NIT pada 1950, Kota Makassar masih tetap mencerminkan suasana kosmopolitan.<sup>14</sup>

Kondisi Sulawesi Selatan belum kondusif pada tahun 1950 dikarenakan memuncaknya permasalahan gerilyawan. Gerakan Kahar Muzakkar di pedalaman Sulawesi menandai pemberontakannya terhadap Republik Indonesia. Kondisi keamanan di pedesaan yang tidak tenang memaksa penduduk memasuki Kota Makassar. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya penduduk di dalam maupun pinggiran kota. Masyarakat Kota Makassar hingga tahun 1950-an, masih merupakan masyarakat yang berasal dari berbagai etnis. Dari hasil survei yang dilakukan H. T. Chabot di satu pemukiman di tengah kota pada 1951-1952, diketahui hanya 35 persen warga setempat lahir di kota, 31 persen penduduk lahir

---

<sup>13</sup> Dias Pradadimara, *Op. Cit.* hlm. 85

<sup>14</sup> Barbara Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi ke DITII*, (Jakarta : Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm. 90.

di daerah Indonesia bagian Timur, seperti Minahasa, Ambon, dan seterusnya. Sedangkan 18 persen lahir di luar Kota Makassar, tetapi masih di daerah Sulawesi Selatan. 6 persen dari keseluruhan warga pemukiman lahir di Jawa, dan 0,5 persen kelahiran Cina.<sup>15</sup>

Kota Makassar tidak dapat lagi disebut sebagai kotanya orang yang berbahasa Makassar, atau kota yang merujuk satu etnis saja. Maka sangat tepat apabila nama Kota Makassar diganti dengan nama Ujung Pandang pada 1971. Nama baru ini, dapat merepresentasikan masyarakat yang multietnis di kota ini, dan tanpa ragu orang-orang yang beragama etnis dapat menyebut dirinya sebagai atau bagian dari “orang Ujung Pandang” yang tidak lagi merujuk ke nama etnis tertentu. Nama ini juga, sebagai wujud masyarakat Kota Modern yang sudah mulai terbentuk di awal abad ke-20.<sup>16</sup>

## **2.2 Gejolak Politik Kota Makassar**

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Belanda dengan segala daya dan usaha mencoba menguasai wilayah jajahannya kembali, begitu pula yang terjadi di Pulau Sulawesi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Agustus 1945 merupakan tonggak masa lalu yang penting dalam perjalanan sejarah Indonesia modern. Seperti yang ditulis oleh Harvey mengenai Sulawesi Selatan selama perang revolusi 1945-1949 menjadi tempat perlawanan

---

<sup>15</sup> Dias Pradadimara, *Op.Cit.*, hlm. 86-87.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

paling hebat di luar Republik yang menentang pengembalian kekuasaan Belanda.<sup>17</sup>

Setelah ditandatangani Persetujuan Linggarjati 25 Maret 1947, dimulai gencatan senjata antara Pro Republik dengan Pro Belanda. Perjanjian ini juga memulai babak baru walau tidak bertahan lama, suatu bentuk pemerintah Republik Indonesia Serikat, yang dimana terdiri atas beberapa negara didalamnya atas kerja sama dengan Belanda. Maka pada 24 Desember 1946 berdirilah Negara Indonesia Timur (NIT) dengan ibukota Makassar.

NIT merupakan salah satu bagian dari Republik Indonesia Serikat, dan negara terbesar di luar pulau Jawa. Wilayah kota yang dikuasai oleh para pejabat pemerintahan Belanda dan NIT, sedangkan untuk daerah-daerah di luar kota masih dikuasai pro Republik. Terbentuknya pemerintahan NIT sebagai upaya Belanda mengembalikan kekuasaannya atas koloninya. Kondisi keamanan Kota Makassar pada masa NIT belumlah stabil. Gejolak-gejolak yang muncul di masyarakat utamanya muncul lantaran masalah KNIL, APRIS, dan Gerilya. Selain itu, setelah persetujuan Linggarjati tidak semata-mata menghentikan gencatan senjata. Sejak kedatangan komandan muda Belanda, Raymond Westerling di Makassar pada 5 Desember 1946, ditetapkan keadaan perang di wilayah Makassar, Bonthain, Parepare, dan Mandar, sampai pada Juli 1949 terjadi tindakan kekerasan antara pro Republik dan Pro Belanda.<sup>18</sup> Hal ini menambah

---

<sup>17</sup> Harvey, *Op.Cit.*, hlm.106.

<sup>18</sup> Harvey, *Op.Cit.*, hlm. 134.

situasi keamanan Kota Makassar semakin tidak menentu yang tidak menuju pada keteraturan.

Setelah Konferensi Meja Bundar pada 1949, Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) berusaha menanamkan pengaruhnya dengan mendatangkan tentara ke Sulawesi Selatan. Keputusan mengirimkan tentara APRIS ke pusat kota NIT, mendapatkan reaksi. Terjadi pertentangan di dalam RIS utamanya mengenai status NIT, ketika 1 Batalyon sedang dalam perjalanan ke Sulawesi Selatan, pihak federasi lantas memutuskan menghalangi segala upaya pendaratan tersebut. Berkat bantuan dari pasukan Andi Azis, yang melucuti pasukan TNI/APRIS di Makassar, kapal-kapal yang mengangkut pasukan dari pemerintahan RIS tidak jadi mendarat. Selain usaha untuk mempertahankan eksistensi NIT, hal ini juga dilakukan Andi Azis agar pemerintah RIS mau menerima bekas pasukan KNIL di Indonesia Timur ke dalam APRIS.<sup>19</sup>

Ketika wakil NIT datang ke Jakarta untuk melaporkan peristiwa yang dilakukan Andi Azis, Menteri Penerangan NIT, Dr Ratulangie, membantah bahwa NIT terlibat dan mendukung tindakan yang dilakukan Andi Azis. Pemerintah RIS pun mengeluarkan ultimatum agar Andi Azis melapor secepatnya ke Jakarta. Pada Maret 1953, ia ditahan dan dihukum 14 tahun penjara. Setelah Andi Azis diamankan, dan Kota Makassar mulai didatangi pasukan RIS yang cukup besar. Sekutu Belanda seperti Soumokil dan para pendukung negara federal telah melarikan diri ke Ambon. Kemudian, para penguasa di Sulawesi Selatan yang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 164-5.

mendukung Belanda dan NIT mendapati kedudukan mereka mulai terancam. Hingga di antaranya mulai mendukung Republik seperti Andi Baso, Datu Tanette, dan pada 21 April 1950 Presiden NIT Sukawati telah menyatakan pemerintahannya bersedia bergabung dalam Negara Kesatuan asalkan Republik juga dimasukkan di dalamnya.<sup>20</sup>

Meskipun Andi Azis telah diamankan, dan menghentikan sementara anggota-anggotanya untuk bertindak lebih jauh. Tetapi adanya hasutan dari golongan reaksioner dari pihak Belanda yang hampir setiap hari bertemu dengan anggota KNIL. Pihak yang pro Belanda inilah yang mengadu domba KNIL dengan tentara APRIS. Angkatan bersenjata APRIS dibantu gerilyawan yang datang dari daerah-daerah pedalaman. Mencoba menguasai Kota Makassar dengan pertempuran yang pada 15-19 Mei 1950. Sepanjang Jalan Hasanuddin, dan penghibur kemudian ke Jalan Karebosi, berputar terus ke Jalan Istana Maricaya, dan Jalan Monginsidi.<sup>21</sup> Selama tiga hari pertempuran terjadi, bentrokan ini menambah ketidakpastian keamanan Kota Makassar, pihak yang paling dirugikan dari peristiwa-peristiwa ini adalah masyarakat kecil. Hal ini diperparah kemudian dengan adanya serangkaian kekerasan kepada penduduk oleh Tentara Kerajaan atau *Koninklijk Leger* (KL) KNIL pada 5 Agustus 1950.

Dibubarkannya NIT, dan adanya semangat menggabungkan diri dalam negara Republik Indonesia, serta berakhirnya gerakan Andi Azis, belum

---

<sup>20</sup> Harvey, *Op.Cit.*, hlm. 170.

<sup>21</sup> Laessach M Pakatuwo, Mustari Bosra, Ahmadin, "Negara Boneka Belanda (Negara Indonesia Timur) 1945-1950", *Jurnal Patingalloang, Pemikiran dan Pendidikan dan Penelitian Kesenjaraan*, Vol 5 No. 1 Januari 2019, hlm. 36.



mengakhiri kondisi ketidaktentraman Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar. Memasuki tahun 1950 hingga 1962 daerah Sulawesi Selatan, kembali disibukkan dengan masalah bekas laskar-laskar dan dua peristiwa politik yang disebabkan dari peta kekuatan politik di tingkat nasional yang mempengaruhi wilayah kota-kota di Indonesia. Permasalahan ini merupakan awal dari masa-masa sulit yang akan datang di Sulawesi Selatan..

Kondisi politik tingkat nasional, yakni gerakan Darul Islam (DI) di Jawa Barat. Menjadi efek domino ke beberapa wilayah ‘Indonesia’ seperti Sulawesi Selatan. Kahar Muzakkar yang telah melakukan gerakan bersenjata ikut bergabung dalam melawan pemerintah pusat. Kahar pun menjabat Komandan Divisi Empat (Hasanuddin), Tentara Islam Indonesia (TII). Setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, pelan-pelan Kahar menerapkan hukum Islam yang ketat di daerah kekuasaannya seperti Makassar, Bugis, Massenrempulu, dan Mandar. Menerapkan kebijakan seperti, pembaharuan kepemilikan tanah, penghapusan ketidakadilan sosial, pelarangan gaya hidup mewah seperti memakai emas, perhiasan, dan sutra. Kebijakan lainnya adalah penghapusan sisa-sisa feodalisme, termasuk lembaga pemerintahan tradisional dan gelar kebangsawanan, serta pelarangan “kepercayaan tradisional” seperti ziarah tempat keramat, pelaksanaan ritual-ritual pra-Islam. Banyak penduduk yang tidak mendukung pemberontak terpaksa harus mengungsi ke kota-kota besar di Sulawesi Selatan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Christian Pelras, *Manusia Bugis*, (Jakarta : Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, 2006), hlm. 336

Seperti yang telah dijelaskan di atas, kekecewaan terhadap pemerintah pusat baik dari segi politik, ekonomi, dan sosial. Memunculkan suatu gerakan politik dan militer, dengan salah satu tuntutan daerah-daerah diberikan otonomi. Tidak lancarnya pembangunan daerah merupakan isu yang paling kuat dirasakan masyarakat di Sulawesi. Partai-partai politik dan berbagai kelompok sosial lainnya berlomba mengajukan jalan ke luar. Salah satu yang populer ketika itu adalah otonomi daerah, dari masalah otonomi provinsi sampai ke taraf kabupaten. Tidak bisa diperkirakan berapa banyak demonstrasi yang dilancarkan untuk memperkuat tuntutan-tuntutan tersebut. Pada bulan pertama 1957 tuntutan-tuntutan makin gencar, bukan saja di Ujungpandang (Makassar) tetapi juga di Manado.<sup>23</sup>

Perkembangan situasi keamanan Sulawesi selalu diperhatikan oleh pimpinan TT/Wirabuana, Letkol Sumual. Kondisi ini dia nilai sedang berkembang ke arah perpecahan. Integrasi ke dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia masih belum mencapai titik memuaskan. Struktur administrasi pemerintahan masih lemah. Gangguan keamanan masih kuat seperti DI/TII Kahar Muzakkar. Keadaan ini menyebabkan gerakan-gerakan otonomi yang muncul dalam masyarakat justru bisa meningkatkan kondisi keamanan semakin berbahaya, sekalipun gerakan otonomi berbeda dengan gerakan separatisme dan federalisme, tuntutan yang tidak bisa dianggap sepele. Bila masalah ini tidak dikendalikan dan diarahkan, maka kesempatan yang luas bagi kekuatan separatisme dan federalisme

---

<sup>23</sup> R.Z. Leirissa, *PRRI-Permesta : Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, (Jakarta : Percetakan PT Temprint, 1991), hlm. 86

dapat muncul. Dalam keadaan seperti ini, Sumual mengambil keputusan untuk bertindak menyelamatkan keutuhan bangsa dan negara.<sup>24</sup> Hal inilah yang mendorong Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang diproklamasikan pada 2 Maret 1957 di Makassar. Permesta merupakan respon terhadap sentralisasi pemerintah pusat di Jakarta.

### **2.3 Gelombang Migrasi**

Perpindahan penduduk menjadi salah satu proses tercepat dalam perubahan sosial di seluruh dunia. Urbanisasi dan pertumbuhan kota dianggap menjadi pendukung berlangsungnya modernisasi dan kemajuan. Hans Dieter Evers yang mengutip pernyataan Daniel Lerner mengatakan, urbanisasi merupakan prakondisi menuju modernisasi dan pembangunan. Masyarakat berpindah dari daerah pedalaman ke pusat-pusat kota yang kemudian menstimulasi kebutuhan dan menyediakan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk “tinggal-landas” ke arah partisipasi warga ke arah yang lebih luas. Pusat-pusat kota yang menghasilkan alat-alat untuk modernisasi.<sup>25</sup> Proses transisi tersebut, kadang kala dipandang sebagian para ahli dengan tidak optimis lantaran masalah urbanisasi. Kota tidak mulai dilihat sebagai pusat perubahan dan kemajuan. Dikarenakan memunculkan permasalahan sosial, buta huruf, penyakit, kejahatan, dan kemiskinan.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 92

<sup>25</sup> Hans-Dieter Evers, *Sosiologi Perkotaan ; Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta ; Penerbit LP2ES), hlm. 49

Asal usul kota-kota besar di Asia Tenggara berasal dari zaman kolonial. Seperti Jakarta, dan Makassar. Evers mengasumsikan kota kolonial bertumbuh pada suku dan asal etnis yang merupakan prinsip utama dari organisasi sosial di kota. Sebagai contoh, Singapura yang sejak berdirinya, Sir Stamford Raffles telah membagi kelompok-kelompok etnis di wilayah tersebut, seperti orang-orang Cina, India, Malaysia, Bugis dan orang-orang Eropa.<sup>26</sup> Begitu juga di Batavia (Jakarta) dan Makassar.

Terdapat faktor-faktor yang menimbulkan arus perpindahan dari pedesaan ke kota, seperti kondisi keamanan di desa yang tidak kondusif, sama halnya yang terjadi di Sulawesi Selatan. Sebab yang lain, adanya daya tarik ekonomi dari kota. Orang berharap akan mendapatkan pekerjaan, hingga kondisi ekonomi membaik yang dapat mengangkat posisi sosial. Di samping itu, terdapatnya fasilitas pendidikan yang lebih baik daripada di desa. Faktor yang lainnya, yang secara lambat laun menambah jumlah penduduk di kota, yakni kelompok kerabat yang berada di kota.<sup>27</sup> Kelompok kerabat ini sangat mendukung bilamana keluarga dari desa ingin ke kota baik karena pendidikan ataupun mencari pekerjaan.

Adanya bangsa asing di Kota Makassar dapat juga dilihat dari berdirinya hotel-hotel yang dibangun sejak zaman Belanda. Orang-orang Eropa, para petugas pemerintah datang berkunjung, pelancong komersial, pebisnis, dan para orang kulit putih yang sedang liburan. Mereka terkadang menikmati keindahan Kota

---

<sup>26</sup> Hans-Dieter Evers, *Op.Cit.*, hlm. 54

<sup>27</sup> J.W. Schoorl, *Modernisasi ; Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara sedang Berkembang*, (Jakarta ; PT Gramedia), hlm. 266-278

Makassar dengan berkeliling menaiki sepeda beroda tiga, yang kita kenal sekarang becak. Seperti pengalaman Theodora Roby Benson, pria berkebangsaan Inggris ini menuliskan pengalamannya di Makassar, dari mengunjungi Benteng Rotterdam, menginap di Hotel Grand dan tidak jauh dari situ terdapat tiga bioskop Eropa dan beberapa toko. Bagian kota yang ditinggali orang Eropa terlihat tertata rapi, dan menurutnya yang paling menarik dari kota ini, terdapat kuil Cina yang menarik.<sup>28</sup>

Ketika Belanda mulai angkat kaki di Kota Makassar. Pemerintah Republik mengambil alih semua hotel. Hotel-hotel kemudian dihuni oleh para keluarga perwira angkatan bersenjata yang ditugaskan di daerah Sulawesi Selatan. Hanya menyisakan beberapa kamar untuk tamu saja. Orang ‘Indonesia’ lebih memilih menginap di rumah keluarga, dan kenalan. Hingga lambat laun salah satu fasilitas kota ini, tidak mendapatkan pemasukan, akhirnya menjadi bangunan rusak dan terbengkalai.<sup>29</sup>

Namun begitu, berdirinya bangunan-bangunan megah yang menjadi simbol kejayaan bangsa Eropa. Diikuti dengan pesatnya inovasi teknologi dengan masuknya juga masyarakat Eropa ke Kota Makassar. Di samping itu, masyarakat Sulawesi Selatan juga menikmati modernisasi yang terjadi. Tetapi sebagian masyarakat juga harus berjuang untuk dapat hidup di kota, Keberadaan mereka sering kali terpinggirkan dengan tidak sebandingnya peningkatan penduduk

---

<sup>28</sup> George Miller, *Indonesia Timur Tempo Doeloe 1544-1992*, (Jakarta : Komunitas Bambu, 2012), hlm. 230

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 278

dengan penyediaan fasilitas kota. Para pendatang tidak tertampung dalam proses perubahan ekonomi dari feodal ke kapitalis. Kondisi tersebut, menciptakan kelompok aktivitas di jalan-jalan kota, rumah-rumah, hotel, pasar, dan pelabuhan yakni golongan gelandangan, pengemis, dan prostitusi, hingga terjadi kekerasan.<sup>30</sup>

Di samping itu, bertambahnya penduduk di Kota Makassar saat terjadi gelombang migrasi ketika menjadi ibukota Negara Indonesia Timur (NIT). NIT memperkuat kedudukan kota Makassar karena menjadi ibukota negara federal dari 1947 hingga 1950 itu. Berbagai fasilitas sebagai ibukota negara dibangun termasuk fasilitas pendukungnya, seperti gedung parlemen dan kementerian, termasuk pula kembali timbulnya kebutuhan akan hotel dan penginapan.

Dalam melancarkan usaha pembangunan infrastruktur tersebut, dan setelah terbentuknya birokrasi NIT dengan slogan “pembangunan”, maka dibentuk Djawatan Pembangunan se-Daerah di Makassar, Manado, Ambon, dan Kupang. Djawatan ini bertugas pembangunan fasilitas fisik berupa perkantoran, sekolah, penjara, perumahan, jalan, saluran pipa air dan lain-lainnya.<sup>31</sup> Kebijakan penting ini pada periode NIT menunjukkan tertatanya fasilitas pemukiman yang menjadikan Makassar sebagai kota modern.

---

<sup>30</sup> Sartono Kartodirdjo, Kuntowijoyo, Bambang Purwanto, *Sejarah Sosial ; Konseptualisasi, Model, dan Tantangan*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013), hlm. 120.

<sup>31</sup> Ilham Daeng Makkelo, “Penataan Kota dan Masyarakat Perkotaan: Makassar sebagai ibukota Negara Indonesia Timur (NIT)”, *Sasdaya, Gadjah Mada Journal of Humanities*, Vol. 2, No. 1, November 2017, hlm. 320.

Pemukiman, rumah-rumah penduduk, hotel, toko yang hancur akibat perang, menjadi tantangan pemerintahan NIT. Mengingat penambahan penduduk di kota juga mulai meningkat dengan posisi Kota Makassar sebagai ibu kota negara. Maka dengan itu, pemerintah menaruh perhatian dengan pembangunan perumahan untuk para *amtenar* negara, dan warga.<sup>32</sup>

Mobilitas di Kota Makassar, dapat kita lihat dari salah satu jantung pertukaran komoditas dan uang, yakni pasar. Salah satu pasar tertua, Pasar Butung yang berada dekat dengan pelabuhan. Ada pula Pasar Kalimbu yang telah ada sejak 1920-an, tidak jauh dari situ terdapat Pasar Terong. Berbagai komoditas berkumpul di pasar-pasar itu, ada yang didatangkan dari luar dari seperti Gowa, Jeneponto, Takalar, Maros, Pangkep, Barru, Soppeng, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Sengkang, Bone dan Sinjai. Keramaian pasar-pasar di Kota Makassar juga disebabkan adanya gelombang migrasi, salah satunya perpindahan penduduk dari pedalaman Sulawesi Selatan yang diakibatkan gerakan Kahar Muzakkar, pada 1950 hingga 1960-an. Pendatang ini banyaknya mengontrak di rumah-rumah warga, maupun di kolong rumah<sup>33</sup>. Ada pula yang mendirikan bangunan-bangunan liar. Kondisi ini disebabkan urbanisasi yang melonjak pada dekade 1950-an. Akibatnya terjadi penumpukkan penduduk dan timbulnya pemukiman yang padat. Maka menyebabkan bangunan liar tidak mampu dikontrol oleh pemerintah kota. Pada awalnya, hanya berdiri gubuk-gubuk sementara yang

---

<sup>32</sup> Ilham Daeng Makkelo, *Op.Cit.*, hlm. 321.

<sup>33</sup> Agung Prabowo dkk, *Pasar Terong Makassar, Dunia Dalam Kota* (Makassar : Penerbit Ininnawa, 2013), hlm. 5.

perlahan menjadi bangunan semi permanen, dan akhirnya sulit ditata atau dipindahkan. Beberapa kali pemerintah kota memaksa untuk membongkar gubuk-gubuk liar di dalam kota, seperti di Jalan Pattunuang, Jalan Haji Bau, Elang, Rajawali, Garuda, Cendrawasih, dan gubuk liar di perkuburan Tionghoa.<sup>34</sup>

#### **2.4 Kemajuan dan Permasalahan Sosial**

Perkembangan kota sebagai akibat urbanisasi menyebabkan di pusat-pusat pemukiman terdapat berbagai kegiatan pelayanan, kemudahan, perdagangan, pemerintahan, pementasan kesenian, dan proses produksi. Dengan demikian akan menampilkan golongan sosial yang tinggal di kota, kaum pedagang, pengusaha, kaum buruh, rakyat jelata, juga golongan elite.<sup>35</sup>

Persoalan lain yang dirasakan warga kota adalah kesemrawutan jalan. Kondisi parkir yang tidak beraturan di setiap jalan. Penjual sayuran, ikan, kain di sepanjang jalan *Pakareppestraat*, *Tempelstraat*, *Muurstraat*, dan *Zandzeestraat*. Beberapa jalan dan ujung gang penuh sampah disertai bau busuk. Akibat dari jalan-jalan yang rusak di pusat-pusat perdagangan sepanjang hari debu jadi pemandangan tidak asing.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Ilham, “Kekerasan dan Kriminalitas di Perkotaan : Anomali Kota Makassar Modern Pada Abad ke-20”, *Lensa Budaya : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, Vol. 14, No.2, 2019, hlm. 57

<sup>35</sup> Sartono Kartodirdjo, Kuntowijoyo, Bambang Purwanto, dkk, *Sejarah Sosial ; Konseptualisasi, Model, dan Tantangan*, (Yogyakarta ; Penerbit Ombak, 2013), hlm 4.

<sup>36</sup> Ilham Daeng Makkelo. *Op.Cit.*, hlm 320.



Salah satu jantung perekonomian kota, pasar. Pasar Kampoeng Baroe yang terletak di tengah kota penuh tumpukan sampah. Banyak kepala keluarga dengan padatnya pemukiman yang tidak memiliki rumah. Kondisi ini menyebabkan beberapa pihak mengusulkan untuk menghapus pasar tersebut di kota. Selain itu, untuk prasarana pasar, hanya Pasar Kalimbu yang mendapat renovasi pada 1940-an.<sup>37</sup>

Salah satu aktivitas masyarakat yang sering terlewatkan dalam wacana sejarah kota adalah prostitusi. Orang yang bertahan hidup dengan cara yang tidak sejalan dengan norma yang dianut sebagian masyarakat kota. Fenomena sosial ini tidak hanya terdapat di kota-kota pulau Jawa, tetapi juga di Kota Makassar. Salah satu penyebab maraknya prostitusi adalah kondisi masyarakat kota kolonial. Kota yang dimana tempat pertama kali menerima berkah dari ekspor produk-produk Belanda. Hal ini telah memicu pertambahan jumlah populasi Eropa. Peningkatan ini disertai dengan peningkatan jumlah hotel, bordil, dan klub-klub malam. Lokasi inilah menjadi lahan subur praktik prostitusi yang kemudian meluas hingga ke kampung dan warung-warung<sup>38</sup>, dan selanjutnya bertahan hingga kota semakin gemerlap.

Pelacuran berkembang di ruang-ruang modern sejak awal abad ke-20, seperti di hotel, tempat hiburan, restoran, bioskop, pertunjukkan stamboel, atau pasar malam. Para pekerja seks terus dikejar-kejar dalam upaya penertiban yang

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 323.

<sup>38</sup> Sartono Kartodirdjo, Kuntowijoyo, Bambang Purwanto, dkk, *Op. Cit.*, hlm.124.

dilakukan pemerintah kota. Keberadaannya seringkali menimbulkan keributan baik di jalan, hotel, atau di tempat tinggalnya. Pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi praktik prostitusi, pada 1955 ditebitkan “Peraturan Pemberantasan Pelatjuran Daerah Kota Makassar.” Peraturan ini melarang adanya tempat-tempat pelacuran baik di jalan, penginapan, rumah makan, asrama, balai pertemuan, dan tempat umum lainnya. Praktik pelacuran semakin terorganisir secara rapi, tertutup, dan melibatkan penduduk setempat. Maraknya kembali rumah-rumah pelacuran, pemerintah pada 1964 melakukan penutupan puluhan rumah pelacuran. Namun dalam waktu yang singkat, kembali muncul dengan jumlah yang lebih banyak, tersebar hingga ke pasar.<sup>39</sup>

Gangguan keamanan di luar Kota Makassar, menyebabkan daerah ini tidak dapat lagi menghasilkan bahan makanan seperti sebelum perang. Dalam keadaan aman Sulawesi Selatan dapat mengeluarkan kelebihan beras kurang lebih 60,000 ton dan kelebihan jagung kurang lebih 40,000 ton. Kondisi keamanan yang belum menentu, menyebabkan rakyat tidak dapat mencapai hasil pangan tersebut. Malahan memungkinkan juga bertambahnya jumlah pengangguran. Dari tahun 1952, terdapat kenaikan jumlah pengangguran 63 persen bila dibandingkan dengan tahun 1951.<sup>40</sup>

Sejak 1960-an, rumah-rumah dari bata dan beton semakin banyak dibangun, mulai dari kota-kota besar hingga mencapai ke kota kabupaten dan

---

<sup>39</sup> Ilham Daeng Makkelo. *Op.Cit.*, hlm. 56-59

<sup>40</sup> Kementerian Penerangan, *Provinsi Sulawesi*, hlm. 522

kecamatan. Rumah batu mulanya dibangun dengan model sederhana, langsung dibangun di atas tanah, tanpa tiang beton atau pondasi batu. Model ini kemudian diikuti dengan desain yang lebih kompleks, serta mencontoh atap rumah Jawa yang miring dan tinggi. Beberapa tahun kemudian orang-orang kaya di Ujung Pandang membangun villa berlantai dua atau tiga bergaya Hollywood, dengan tiang-tiang model antik yang langsung menopang atap, yang kemudian ditiru pula di kota-kota lain di Sulawesi Selatan.<sup>41</sup>

Dalam wacana sejarah sosial, kota seringkali mencakup proses urbanisasi, mobilitas penduduk, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya. Dalam perubahan sosial terjadi banyak inovasi sebagai dampak introduksi nilai, sistem, komoditi, teknologi baru. Proses adaptasi terhadap kehadiran masyarakat menuntut perubahan pola kelakuan. Maka revolusi sudah barang tentu umumnya berpusat di kota-kota. Dinamika yang terjadi di kota, seperti pelembagaan senantiasa memakan waktu, dan tidak jarang penuh ketegangan, keresahan, konflik, dan benturan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Christian Pelras, *Op. Cit.*, hlm. 355.

<sup>42</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2016), hlm. 58.